



MALIOBOROKU
Sayang MALANG

Belum Dua Tahun SUDAH CEMONG

Jalur pedestrian di trotoar timur Jl. Malioboro diresmikan pada 22 Desember 2016. Uang yang dikururkan untuk membiayai proyek penataan Malioboro tahap pertama mencapai Rp23,7 miliar. Belum sampai dua tahun, banyak fasilitas yang rusak.

FASILITAS DI JALUR PEDESTRIAN*	KERUSAKAN PADA FASILITAS MALIOBORO
32 Lampu budaya	■ Guding block, atau jalur pemandu untuk penyandang difabel, sudah banyak yang lepas.
94 Tempat sampah	■ Beberapa kursi dicoret-coret.
115 Kursi dengan sandaran	■ Lantai teraso menguning karena minyak.
54 Kursi tanpa sandar	■ Stiker ditempel di tiang atau lampu, untungnya mudah dilepas.
413 Bollard tabung	■ Beberapa tempat sampah rusak.
68 Bollard bulat	■ Sampah masih berserakan meski sudah ada tempat sampah.
71 Pohon asam Jawa	
9 Pohon gayam	

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui
 Jumpa Pers

.....
 Kepala
 etaris

*Data diperoleh dari hasil observasi lapangan di sekitar Pasar Beringharjo. Sumber: wawancara & pengamatan (Rika, 2018)

JOGJA-Kawasan pedestrian Malioboro sisi timur rampung dipermak dan menjadi cantik sejak Desember 2016. Sekarang, paras penggal jalan yang termasyhur itu sudah burik di beberapa bagian.

*Ujang Hasanudin & Sunarto
redaksi@harianjogja.com*

- ▶ Masih ada PKL yang tidak mematuhi kesepakatan sehingga lantai teraso jadi kusam.
- ▶ Tim infrastruktur yang dibentuk UPT Malioboro berpatroli siang dan malam untuk mengecek fasilitas di jalur pedestrian Malioboro.

Berdasarkan pengamatan *Harian Jogja* pekan lalu, beberapa fasilitas di jalur pedestrian yang rusak atau ternoda meliputi jalur pemandu untuk tunanetra (*guiding block*), tempat sampah, lantai teraso, dan bangku berbilah jati yang dicoret-coret. Malioboro juga tak bersih-bersih amat. Kantong plastik dan puntung rokok berserakan dan dijejalkan di jeruji besi pelindung pohon.

Birokrasi menjadi salah satu persoalan yang menghambat pengawasan Malioboro. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Malioboro, jawatan yang dibikin Pemerintah Kota Jogja untuk mengawasi ikon wisata Jogja tersebut, menyatakan pemeliharaan trotoar sisi timur belum maksimal karena kawasan itu masih dalam proses revitalisasi.

Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh Prabowo mengatakan jawatannya hanya memiliki anggaran Rp100 juta per tahun untuk memelihara sisi timur Malioboro. Anggaran tersebut hanya untuk kerusakan-kerusakan ringan. "Paling untuk pengecatan, mengencangkan baut kursi yang kendur, dan perawatan tanaman," kata Syarif, Jumat (23/3).

Jika ada kerusakan berat, UPT Malioboro akan melapor ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja.

Malioboroku Sayang...

Sejauh ini, menurut Syarif, belum ada kerusakan berat. UPT Malioboro sudah membentuk tim infrastruktur sejak enam bulan terakhir untuk mengantisipasi kerusakan minor.

Tim berisi 20 orang itu akan berpatroli setiap hari, siang dan malam, mulai dari ujung Malioboro di bagian utara hingga Jalan Pangurakan. Tim membawa perkakas pertukangan. "Jadi kalau ada kerusakan ringan langsung diperbaiki," kata Syarif.

Tim tersebut berbeda dengan Jogoboro yang sudah dibentuk lebih dahulu untuk menjaga keamanan di sepanjang kawasan tersebut. Menurut Syarif, kewenangan pengawasan UPT Malioboro masih terbatas. Ini cukup merepotkan.

Ia mencontohkan perawatan tanaman dan pohon masih menjadi kewenangan kontraktor. Jika menemukan tanaman dan pohon yang mati, UPT Malioboro kemudian melaporkannya.

UPT Malioboro juga memberitahukan kerusakan *guiding block* ke kontraktor yang memasangnya.

Syarif mengatakan ada puluhan keping *guiding block* yang copot dan sudah dikumpulkan tim infrastruktur.

"Tinggal dipasang lagi, tapi supaya pemasangannya sama, harus dikoordinasikan dulu dengan yang *masang*," ujar dia.

Ihwal lantai teraso yang kusam karena sering disiram minyak goreng sisa masakan pedagang kaki lima (PKL), UPT sudah berusaha menertibkan. Namun, tetap saja

ada pedagang yang nakal.

"Menjaga Malioboro tidak bisa sempurna. Tetapi kami berupaya terus menyempurnakan," ujar dia.

Keberadaan bakul yang kurang mampu merawat Malioboro diakui Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKMM) Rudiarto. Dia mengatakan semua PKL, khususnya bagian kuliner, sudah bersepakat untuk memasang alas di kedai mereka supaya percikan minyak goreng tidak langsung mengotori teraso. Namun, kesepakatan itu tak dipatuhi semua orang.

"Masih ada satu dua pedagang yang belum memasang perlak," kata dia.

Beberapa Tahap

Jalur pedestrian Malioboro dibangun dalam beberapa fase. Tahap pertama dari depan Hotel Inna Garuda hingga sebelum Pasar Beringharjo sepanjang 910 meter dengan luas 10.700 meter persegi. Fasilitas area ini meliputi 32 unit lampu budaya, 94 tempat sampah, 115 kursi dengan sandaran, 54 kursi tanpa sandaran, 413 *bollard* tabung, dan 68 *bollard* bulat (*lihat grafis*). *Guiding block* juga dipasang di sepanjang trotoar. Pemda DIY mengucurkan dana Rp23,7 miliar untuk merehab Malioboro pada tahap pertama. Sementara, revitalisasi tahap kedua mencakup depan Pasar Beringharjo sampai Titik Nol. Fasilitasnya mirip, meski tak selengkap jalur pedestrian di sebelah utara. Namun, area ini memiliki toilet bawah tanah yang berada di

depan Gedung Bank Indonesia. Jalur pedestrian tahap pertama diresmikan pada 22 Desember 2016, sedangkan tahap kedua diresmikan pada 9 Januari 2018.

Saat meresmikan jalur pedestrian tahap pertama, Gubernur DIY Sri Sultan HB X sudah mewanti-wanti pedagang untuk tetap menjaga keindahan Malioboro. Sultan juga melihat jalur pemandu untuk tunanetra yang dipasang di teraso. Selanjutnya, Pemda DIY akan membenahi sisi barat Jl. Malioboro supaya lebih apik.

Kerusakan-kerusakan di trotoar sisi timur, meski minor, menunjukkan perawatan fasilitas yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah belum benar-benar bagus.

Ardhyasa Fabrian Gusman, arsitek kawasan Malioboro mengatakan pengelolaan sangat penting agar revitalisasi tidak sia-sia. "Pemerintah sering kelupaan, membangun tetapi tidak diiringi dengan tim pengelola," kata dia, Jumat.

Furnitur jalanan (*street furniture*) seperti kursi, *bollard*, dan *guiding block*, harus mendapatkan perhatian serius. Pemerintah semestinya memberikan kewenangan perawatan secara jelas kepada organisasi perangkat daerah. Menurut dia, UPT Malioboro perlu diberi kewenangan lebih gede.

"Agar berkewajiban mengelola seluruh elemen yang ada di ruang Jl. Malioboro. Jadi kalau ada kursi rusak, UPT bisa mengganti dan punya cadangan material sendiri," ucap dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005